

APBD – PERTANGGUNGJAWABAN - TAHUN ANGGARAN 2016

2016

PERDA KAB.OKUT NO.3,LD.2016/NO.3,LL SETDA KAB.OKUT : 8 HLM

PERATURAN DAERAH OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 yang telah di ubah dengan UU No. 9 Tahun 2015, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD OKUT Tahun Anggaran 2015.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 12 Tahun 1985 di ubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 ; UU No. 18 Tahun 1997 di ubah UU No. 34 Tahun 2000 ; UU No. 21 Tahun 1997 ; UU No. 28 Tahun 1999 ; UU No. 17 Tahun 2003 ; UU No. 37 Tahun 2003 ; UU No. 1 Tahun 2004 ; UU No. 10 Tahun 2004 ; UU No. 25 tahun 2004 ; UU No. 33 Tahun 2004 ; UU No. 23 Tahun 2014 di ubah UU No. 9 Tahun 2015 ; PP No. 20 Tahun 2001 ; PP No. 65 Tahun 2001 ; PP No. 65 Tahun 2001 ; PP No. 24 Tahun 2004 di ubah PP No. 37 Tahun 2005 ; PP No. 23 Tahun 2005 ;PP No. 54 Tahun 2005 ; PP No. 55 Tahun 2005 ; PP No. 56 Tahun 2005 ; PP No. 57 Tahun 2005 ; PP No. 58 Tahun 2005;PP No. 65 Tahun 2005 ; PP No. 8 Tahun 2006 PP No. 71 Tahun 2010 ; Permendagri No. 21 Tahun 2011 ;Permendagri No. 64 Tahun 2013 ; Perda NO. 36 Tahun 2007 ; Perda No. 37 Tahun 2007 ; Perda No. 38 Tahun 2007 ; Perda No. 38 Tahun 2014 ; Perda No. 2 Tahun 2015.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur Tahun Anggaran 2015, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur juga rincian Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur Tahun Anggaran 2015.

CATATAN : - Peraturan daerah ini ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 2016 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkanya, tanggal 30 Agustus 2016;
- Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.